

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dengan menggunakan alat analisis yaitu Kerangka Strategi Model Mediasi oleh Jacob Bercovitch, Norwegia melaksanakan serangkaian perundingan dengan menjalankan tiga strategi yaitu strategi komunikasi-fasilitasi, strategi formulasi dan strategi manipulasi. Dalam menjalankan strategi komunikasi-fasilitasi, perwakilan Norwegia melakukan diskusi terpisah dengan Vellupillai Prabhakaran dan Presiden Chandrika Kumaratunga untuk berbagi informasi terkait dengan proses damai, berusaha mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan agar LTTE untuk ikut terlibat dalam proses mediasi. Setelah dilaksanakannya kedua diskusi terpisah tersebut, Norwegia menawarkan rancangan mengenai proses perdamaian yang akan memberi peluang bagi kedua belah pihak untuk terlibat lebih lanjut dalam proses perdamaian.

Strategi formulasi dijalankan oleh Norwegia dengan memilih negara netral tempat mediasi akan dilaksanakan. Norwegia memberi masukan terhadap bentuk dan prosedur seperti apa yang akan dijalankan dalam mediasi sehingga dapat menyoroti kepentingan umum, dapat mengurangi ketegangan dan menangani permasalahan yang paling sederhana. Dalam rangka untuk mengurangi ketegangan dan menangani permasalahan paling sederhana, dibentuk berbagai kerja gabungan antara Pemerintah Sri Lanka dan LTTE yaitu *Joint Committee*, *Joint Task Force*. Selain itu juga dibentuk berbagai sub-komite diantaranya

*Sub-committee on Immediate Humanitarian Rehabilitation Needs* dan *Sub-Committee on De-escalation and Normalization*.

Norwegia menjalankan strategi manipulasi dengan berusaha mengubah pandangan LTTE mengenai tuntutan mereka terhadap kemerdekaan bagi Tamil Eelam dengan membentuk *Sub-Committee on Political Affairs*. Pemerintah Norwegia juga memberikan solusi dengan menyarankan bahwa tuntutan Tamil untuk menjadi terpisah dengan Sri Lanka dapat diselesaikan dengan menjadikan Sri Lanka sebagai negara dengan struktur federal. Strategi manipulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia juga dilakukan dengan bentuk memberikan sumber daya dalam bentuk bantuan dana dengan membentuk *North East Reconstruction Fund* dengan mengajak donor lainnya yaitu AS, Jepang, Uni Eropa dan PBB. Namun Norwegia tidak dapat menekan pihak yang berkonflik untuk menunjukkan fleksibilitas dan komitmennya dalam proses damai. LTTE yang tidak diikutsertakan dalam persiapan konferensi donor di Washington akhirnya memilih untuk menunda keterlibatannya dalam perundingan di Thailand dan konferensi donor di Tokyo pada tahun 2003. Pemerintah Sri Lanka pun tidak menunjukkan komitmennya dalam proses damai, setelah pergantian presiden pada tahun 2006, Mahinda Rajapaksa membatalkan kesepakatan mengenai perubahan sistem federal bagi Sri Lanka seperti yang telah disepakati pada perundingan sesi IV. Rajapaksa mengatakan bahwa akan mengganti peran Norwegia sebagai mediator dengan PBB, India atau organisasi regional lainnya. Norwegia akhirnya berhasil meyakinkan Pemerintah Sri Lanka dan LTTE agar kembali ikut dalam proses damai dengan mengajukan beberapa syarat.

Namun kesepakatan untuk terlibat kembali dalam proses damai tidak menghentikan kekerasan yang terjadi. Serangkaian serangan antara Pemerintah Sri Lanka dan LTTE membuat SLMM menghentikan misi pengawasannya pada tahun 2 Januari 2008. LTTE pada 18 Mei 2009 menghubungi Norwegia untuk menyampaikan bahwa LTTE telah menyerah dalam perang melawan Pemerintah Sri Lanka. Namun Pemerintah Sri Lanka tidak menerima penyerahan diri LTTE tersebut. Angkatan bersenjata Sri Lanka kemudian menyerang benteng pertahanan terakhir LTTE dan membunuh Vellupillai Prabhakaran, Nadesan, Pulidevan, Soosai dan Pottu Amman. Pemerintah Sri Lanka akhirnya mengumumkan kemenangan Sri Lanka melawan LTTE pada 18 Mei 2009 dan sekaligus mengakhiri peran Norwegia di Sri Lanka serta menandakan bahwa gagalnya mediasi yang telah dijalankan karena tidak didapatkannya kesepakatan damai final serta perang yang dipilih sebagai jalan akhir. Hal tersebut menyiratkan gagalnya strategi yang dijalankan oleh Norwegia dalam mediasi dalam konflik Sri Lanka.

## 5.2 Saran

Konflik separatis di Sri Lanka bukanlah satu-satunya konflik separatis yang terjadi saat ini. Gagalnya mediasi dalam proses damai konflik Sri Lanka lebih dikarenakan tidak adanya rasa saling percaya dan komitmen di antara pihak yang berkonflik. Peneliti menyarankan dalam proses mediasi pada konflik separatis lainnya, selain mediator yang bertugas sebagai pihak ketiga yang menjalankan berbagai strategi agar mediasi dapat berhasil, pihak-pihak yang berkonflik seharusnya juga dapat memberikan komitmennya secara penuh dalam proses

damai agar mediasi dapat berjalan lancar dan didupatkannya kesepakatan damai final agar perang tidak terulang kembali

